

KONSEP REVOLUSI KEBUDAYAAN MENURUT MAO ZEDONG

Sri Harmini dan Nusyirwan

Abstract: The purpose of this paper is to describe Mao Zedong's thoughts on especially his concept of cultural revolution. This study describes the cultural revolution which is understanding as a societal strategy of change which being put forward by Mao according to Marx's concept of historical step toward communist society.

Marx' and Lenin's concepts influence Mao's thoughts and policies during his power. As Lenin did to Marx, Mao took only the core of their thoughts, and then modify its content to suit China's objective conditions. Mao's concept of cultural revolution is a long, thorough and continuous process that begins from one event leads to another

Kata kunci: Mao, revolusi kebudayaan, garis massa

Setelah kurang lebih selama 30 tahun melawan kolonialisme dan melewati perang saudara melawan Partai Nasionalis; pada tanggal 1 Oktober 1949 diproklamirkan berdirinya negara baru yaitu Republik Rakyat Cina dengan presiden dijabat oleh Mao Zedong (Fairbank, 1976, 361).

Mao sebagai pemimpin Republik Rakyat Cina, menjadi arsitek negara baru yang mengubah tidak hanya dalam sistem pemerintahan melainkan juga cara pandang dunia internasional terhadap bangsa Cina, dan yang terpenting adalah cara pandang masyarakat Cina terhadap diri mereka sendiri. Cina yang selama ini identik dengan kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan telah menjelma menjadi suatu negara mandiri.

Langkah pertama adalah mempersiapkan landasan pembangunan menuju suatu negara sosialis industri modern. Pemerintahan koalisi dibentuk dengan tugas awal menyelesaikan masalah-masalah mendesak dalam rangka rekonstruksi dan konsolidasi, seperti yang disusun Mao dalam *New Democracy* (1940) dan *On Coalition Government* (1945) (Wang, 1976: 13). Rencana Pembangunan Lima Tahun pertama (*the First Five Year Plan*) secara resmi diluncurkan tahun 1953 dan berakhir pada tahun 1957. Mao memberi penekanan pada pembangunan industrialisasi dengan perhatian utama industri berat. (Eipstein, 1956: 131).

Perkembangan industri yang pesat diimbangi dengan modernisasi di bidang-bidang yang lain yaitu pertanian, transportasi, pendidikan, kesehatan dan komunikasi. Reformasi agraria adalah agenda pemerintah selanjutnya, undang-undang agraria baru disusun untuk mengatur kepemilikan tanah pertanian milik perseorangan menjadi milik kolektif yang dibagi secara adil dan dikerjakan secara bersama-sama, untuk kepentingan publik (Wang, 1976: 320).

Perhatian pembangunan dalam bidang industrialisasi menyebabkan pembangunan bidang yang lain tertinggal jauh, dan ini terlihat pada bidang

Sri Harmini adalah alumni Filsafat UGM, sedangkan Nusyirwan adalah dosen Pembimbing skripsi, mendalami Metodologi Filsafat

pertanian yang pertumbuhannya tidak dapat mengimbangi perkembangan industri. Di samping itu pola kepemimpinan Mao yang sentralistik tidak banyak memberikan ruang gerak bagi otonomi daerah untuk menjalankan kebijakan-kebijakan mereka, karena keputusan terakhir tetap berada di tangan pemerintah pusat.

Mao yang menyadari kesalahan ini berusaha memperbaikinya dengan meluncurkan program baru dengan nama Lompatan Jauh ke Depan (*the Great Leap Forward*) pada tahun 1958-1959, metode dan strategi pembangunan diubah, tahap-tahap pembangunan Cina tetap mengacu pada pembangunan Uni Soviet namun disesuaikan dengan realitas objektif Cina. Kongres Partai ke-8 menetapkan agenda pembangunan selanjutnya adalah mengusahakan terjadinya keseimbangan antara kebutuhan material dan kebudayaan masyarakat, dengan tujuan mengubah Cina menjadi suatu negara sosialis industri yang modern secepat mungkin. Istilah secepat mungkin diartikan bahwa dalam pelaksanaannya boleh melompati tahap-tahap normal pembangunan untuk memperpendek jalan menuju sosialisme. (Wheelwright & McFarlane, 1973: 80).

Namun demikian, jajaran elit partai menganggap bahwa pembaharuan Cina belumlah tuntas, mereka menganggap bahwa cita-cita masyarakat sosialis belum tercapai dan Great Leap Forward dianggap gagal. Kegagalan Great Leap Forward menyebabkan terpecahnya kepemimpinan dalam partai tidak hanya dalam strategi pembangunan tapi juga secara ideologis. Peng Dehuai, Menteri Pertahanan Nasional, pada konferensi Komite Sentral Partai (1959) melontarkan kritik dan menimpakan kesalahan kepada Mao, namun setelah pertemuan tersebut ia dipecat dari kedudukannya. Mao menyebutnya "kaki tangan kapitalis" yang berusaha menancapkan kembali kekuasaannya. Insiden ini mengawali Revolusi Kebudayaan.

Revolusi Kebudayaan ternyata mengakibatkan roda pemerintahan tidak berjalan dengan semestinya dan menimbulkan banyak korban. Kesalahan ditimpakan pada Mao sebagai pencetus gagasan, atas korban-korban yang ditimbulkannya. Namun ironisnya, dalam pandangan bangsa Cina sendiri, ia tetap dipuja-puja sebagai seorang pahlawan yang berjasa menyelamatkan kelangsungan hidup bangsa dan mengantarkan mereka menuju suatu dunia baru yang merdeka, bebas dari tuntunan negara lain. Pada survei tahun 1994, dari 6.000 orang, 40% memilih Mao sebagai figur politisi favorit mereka, 26% memilih Zhou Enlai, dan kurang dari 10% memilih Deng Xiaoping (AsiaWeek, 1996: 29-39). Masyarakat korban revolusi kebudayaan sendiri tidak banyak menyalahkan keadaan ini kepada Mao, mereka menyadari bahwa hal itu memang seharusnya dilakukan, tidak ada revolusi yang berjalan dengan mulus dan perlahan-lahan, perjuangan akan selalu membutuhkan pengorbanan terutama dari rakyat.

GARIS MASSA, KONTRADIKSI DAN PRAKTEK

Pemikiran Marxis Mao sendiri mulai terbentuk setelah ia membaca tiga buku penting, yaitu: *Manifesto Komunis* terjemahan Chen Wang-tao, *Pertarungan Kelas* oleh Karl Kautsky dan *Sejarah Sosialisme* oleh Kirkupp.

Edgar Snow menyebut periode pemikiran ini sebagai periode Marxis, karena ide-ide pikirannya belum dapat diterima oleh masyarakat (Snow, 1944: 156).

Pemikiran Mao sering disebut sebagai "Maoisme". Dalam bukunya *Mao and The Chinese Revolution*, Chen Jerome menyatakan bahwa istilah ini secara salah telah dipopulerkan oleh para pelajar dari Universitas Harvard dalam tulisan-tulisan mereka untuk menunjuk kepada pemikiran-pemikiran Mao. Pemikiran Mao pada dasarnya merupakan gabungan pemikiran dari tokoh-tokoh sebelumnya (bukan hanya kaum Marxian), yang disesuaikan dengan situasi objektif negara Cina dan dipadukan dengan pengetahuan intelektual dan pengalaman-pengalaman perjuangan revolusinya, sehingga menjadi suatu konsep pemikiran yang sangat pragmatis dan luwes berlaku di Cina. Pemikiran-pemikiran Marxis Mao inilah selanjutnya yang disebut sebagai *Maoisme* (Ch'en, 1967: 3-4).

Secara global, pemikiran politik Mao terlihat dalam pandangannya tentang "garis massa" yang terkenal dengan semboyan "dari massa, untuk massa". Ia menyatakan dengan tegas bahwa: suatu kebijakan politik partai dapat disebut bagus hanya jika gagasannya secara murni berasal dari massa yaitu petani dan pekerja, dengan memperhitungkan kepentingan dan keinginan mereka (Wang, 1976: 55). Implementasi kebijakan tersebut, sebagus apapun tetap harus mendapat dukungan dari massa¹.

Mao berangkat dari teori pengetahuan Marx, bahwa pengetahuan diperoleh dari praktek (pengalaman) dalam masyarakat yang muncul karena adanya kontradiksi-kontradiksi di dalamnya. Kontradiksi diartikan sebagai perbedaan-perbedaan pandangan di antara massa, baik individu ataupun kelompok. Pendapat-pendapat ini merupakan wujud dari keinginan-keinginan rakyat, yang selanjutnya dibawa kepada level yang lebih tinggi (kader-kader partai) untuk dicari pemecahannya. Setelah dianalisa dan disusun secara sistematis dibawa lagi ke tingkat yang lebih tinggi (pusat) untuk menentukan solusi yang tepat bagi persoalan tersebut.

Menurut John Lewis proses ini meliputi tahapan-tahapan: persepsi, pengumpulan pendapat-pendapat, pengambilan keputusan partai, dan tahap implementasi. Para kader partai membuat daftar terhadap pandangan-pandangan yang muncul dari dalam massa yang belum teratur dan belum sistematis, kemudian gagasan-gagasan tersebut mereka pelajari untuk dilaporkan kepada kewenangan yang lebih tinggi. Berdasarkan laporan kader tersebut pemegang kekuasaan yang lebih tinggi memberi masukan ataupun instruksi dan dikembalikan lagi kepada massa, pada tahap ini pendidikan politik dan propaganda-propagandanya terus dilakukan oleh kader yang berada di tengah-tengah massa. Dan ketika massa merasa memiliki gagasan-gagasan tersebut, kemudian diterjemahkan ke dalam gerakan yang nyata (Lewis, 1963: 72).

Menurut Mao ini bukanlah tahap terakhir, karena untuk selanjutnya proses ini harus diulangi beberapa kali sehingga setiap kali gagasan-gagasan menjadi lebih baik. Konsep ini membutuhkan kerja sama antara pemimpin dan massa agar saling belajar, saling memberi dukungan, dan selalu terjadi dialog antara pemimpin dan yang dipimpin. Tiga subjek utama yang terlibat adalah politbiro

sebagai pemimpin tertinggi, kader-kader partai sebagai level menengah dan massa sebagai tingkat terendah (Gray & Cavendish, 1968: 225).

Konsep garis massa menjadi alat monitoring terhadap elit birokrat dan kecenderungan mereka untuk mengatur massa melalui partai dan sanksi-sanksi yang tidak jelas (Lewis, 1963: 84-86). Meskipun partai adalah pemimpin massa, namun kedudukannya tidak lebih tinggi dari massa. Digambarkan Mao hubungan antara partai dengan massa seperti ikan dan air, antara massa dan partai saling membutuhkan (Chen, 1970: 56).

Pemikiran-pemikiran Mao tentang manusia bisa dikatakan lebih moralis bila dibandingkan dengan tokoh-tokoh Marxis yang lain. Manusia bukanlah suatu "produk yang sudah jadi", ia dipengaruhi oleh lingkungan di sekelilingnya, terutama pendidikan. Melalui pendidikan, kesadaran sosial seseorang dapat dibentuk. Berbeda dengan Marx ia menolak pendapat Marx yang menyatakan bahwa masing-masing individu telah ditentukan kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan-kepentingannya berdasarkan sifat kelasnya. Menurut Mao, keanggotaan seseorang dalam suatu kelas dapat berubah, ia dapat dibentuk menjadi manusia baru melalui "pendidikan-kembali" (re-edukasi). Mao ingin menyatakan bahwa apa yang selama ini dinyatakan sebagai "takdir" adalah omong kosong, manusia berhak sepenuhnya atas hidupnya, dan berhak untuk menentukan dan mengubah kehidupannya.

Pandangan ini mendasari konsepnya tentang voluntarisme, bahwa keinginan dan kebulatan tekad manusia pada akhirnya akan mampu melalui segala rintangan untuk menuju dunia yang lebih baik (Wang, 1977: 41-46). Digambarkan oleh Mao dalam puisinya tentang seorang orang tua yang berusaha memindahkan pegunungan dengan berdasar keyakinan, ketekunan dan kekerasan hati. Puisi ini sangat populer pada masa-masa revolusi kebudayaan.

Tindakan dan keputusan-keputusan Mao yang moralis telah mengubah teori "materialisme-dialektik" Marx, menjadi "moralisme-dialektik". Belajar dari pengalaman Lenin, Mao menyimpulkan bahwa transformasi fisik (sarana-sarana produksi) tanpa diimbangi dengan transformasi moralitas masyarakat, tidak akan menjamin kelanggengan masyarakat baru. Bentuk-bentuk kesadaran sosial harus diubah sama sekali dan harus mempunyai landasan yang kuat. Oleh karena itu pemikiran-pemikiran sosialis harus ditanamkan kepada masyarakat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari hingga menjadi *way of life* (Wertheim, 1974: 335).. Ini adalah tujuan program Revolusi Kebudayaan

REVOLUSI KEBUDAYAAN

Setelah simplifikasi yang dilakukan Lenin, Marxisme di tangan Mao semakin kehilangan unsur-unsur spesifiknya, antara lain tentang kritik kapitalisme, perkembangan industrialisasi, perjuangan kelas, dan diktator proletariat. Mao pun meninggalkan hukum-hukum deterministik Marxisme. Menurutnya setiap masyarakat berkembang sesuai dengan perubahan-perubahan kondisi ekonomi, sosial, dan politiknya. Karena kondisi objektif masing-masing masyarakat unik, maka tidak ada satupun perkembangan masyarakat yang berjalan mengikuti teori keniscayaan sejarah Marx. Bukan tujuan ditentukan

sejarah melainkan kehendak revolusioner yang menentukan sejarah.

Menurut Mao, revolusi yang merupakan suatu bagian integral dari perubahan sosial adalah suatu proses kontinyu. Terjadinya revolusi tergantung dari ada tidaknya kehendak revolusioner massa dan adanya suatu bangunan partai yang kuat. Revolusi Mao adalah salah satu dari sekian tahap perubahan masyarakat yang direncanakan, dan akan terus berlangsung hingga tercapainya sosialisme sebagai cita-cita akhir masyarakat. Mao tidak menentukan berapa lama suatu revolusi akan berlangsung, ia hanya menyatakan bahwa revolusi akan berakhir ketika sosialisme telah tercapai di seluruh negara di dunia. Inilah revolusi permanen.

Reformasi Agraria, Rencana Pembangunan Lima Tahun, Lompatan Jauh ke Depan, serta Revolusi Kebudayaan adalah serangkaian gerakan revolusi permanen pada masa pemerintahan Mao. Kontinuitas dalam gerakan revolusi diperlukan untuk menjaga kesatuan tujuan dan kesamaan kehendak antara pemerintah dan rakyat.

Menurut Mao, penggulingan pemerintahan lama dan pengalihan alat-alat produksi kepada proletariat saja belum cukup untuk terwujudnya masyarakat baru, kecuali telah terbentuk suatu konsep yang sama dalam pikiran masyarakat. Dengan kata lain, bentuk-bentuk kesadaran sosial dan bangunan atas masyarakat lama harus digantikan oleh ideologi baru.

Secara resmi Revolusi Kebudayaan dicanangkan pada pertemuan Komite Sentral ke-8 tahun 1966, tercantum dalam 16 poin resolusi sebagai petunjuk atas tindakan rakyat dalam masa revolusi. Atas nama penghapusan "4 hal-hal kuno" (4 olds), yaitu: kebudayaan, gagasan pemikiran, tradisi dan kebiasaan-kebiasaan kuno, Tentara Merah (Red Guards) berhak menghancurkan segala hal yang berhubungan atau mengingatkan mereka dengan peradaban Barat dan feodalisme, termasuk benda-benda warisan sejarah. (Kaiming, 1986: 226-227).

Akar dari kekacauan ini adalah perseteruan politik di tingkat elit pemerintahan, perbedaan ideologi menyebabkan terpecahnya kepemimpinan menjadi 2 pihak yaitu: pendukung Mao dan yang anti Mao. Masing-masing berusaha mencari massa sebanyak-banyaknya, generasi muda adalah target mereka. Dukungan rakyat merupakan legalisasi posisi seseorang dalam pemerintahan, keadaan ini dimanfaatkan untuk mencapai tujuan-tujuan untuk menyingkirkan lawan-lawan mereka dari pemerintahan. Kekuasaan tertinggi pada saat itu berada di tangan massa, yang menentukan apakah seseorang disebut revolusioner atau kontra-revolusi.

Lin Biao, salah seorang pendukung Mao menerbitkan buku saku yang sangat populer pada masa itu, terkenal dengan sebutan "buku merah kecil" (*little red book*), berisi kutipan-kutipan perkataan Mao, sebagai pedoman tindakan anggota Tentara Merah dan rakyat secara umum. Buku ini sengaja diterbitkan dalam upaya kultus individu terhadap Mao yang pada saat itu telah turun dari jabatan presiden, sekaligus sebagai legitimasi kekuasaan Mao (<http://www.geocities.com/College Park/Library/6132>).

Seluruh tindakan masyarakat harus didasarkan atas argumen-argumen yang kuat dan bukan atas dasar kekuatan fisik, inilah semboyan yang selalu diserukan

oleh Lin Biao dan Jiang Qing sebagai pemimpin revolusi kebudayaan. Namun pada kenyataannya ini adalah nol besar, karena Tentara Merah yang mempunyai wewenang untuk menentukan benar atau salah seseorang, cenderung melakukan kekerasan secara fisik dan mengesampingkan rasionalitas. Pelanggaran hak-hak individu menjadi hal biasa, tidak ada kebebasan individu, rakyat selalu diliputi kecemasan dan perasaan was-was, karena tidak ada seorang pun yang dapat mereka percaya, tidak juga anggota keluarga yang lain.

Revolusi Kebudayaan Mao bukanlah suatu konsep kosong belaka, ia berusaha melakukan suatu perubahan sosial yang lebih menyeluruh ke segala aspek kehidupan manusia, bukan hanya transformasi secara fisik saja namun juga mental masyarakatnya.

PENUTUP

Revolusi kebudayaan Mao selanjutnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kontradiksi (konflik) internal adalah unsur terpenting dalam perkembangan masyarakat yang menimbulkan perubahan-perubahan, mendorong perkembangan dan kemajuan masyarakat.
2. Keberhasilan Marxisme di Cina adalah karena Mao menerapkan Marxisme dan Leninisme sesuai dengan kondisi sosial, politik, dan geografis bangsa Cina.
3. Transformasi sosial tidak dapat dicapai hanya dengan pengalihan kepemilikan atas alat-alat produksi kepada proletariat, dibutuhkan perubahan secara mendasar (ideologi) dengan membentuk manusia-manusia sosialis baru melalui re-edukasi.
4. Revolusi kebudayaan adalah salah satu dari sekian banyak gerakan massa yang terjadi, yang merupakan suatu proses kontinyu dari konsep revolusi permanen Mao.

Kemauan untuk melakukan perubahan dan semangat juang rakyat Cina dalam memajukan negerinya dapat dicontoh oleh setiap negara berkembang di dunia, termasuk Indonesia. Melalui pengorbanan harta benda dan nyawa rakyatnya dalam tahapan-tahapan sejarah berupa revolusi kebudayaan, pola kepemimpinan Mao (walaupun bersifat otokratik dan diktatorial) telah membawa Cina menjadi negara yang mandiri, kuat dan berdaulat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ch'en, J., 1967, *Mao and the Chinese Revolution; with 37 Poems by Mao Tsetung*, Trans.: M. Bullock, Oxford University Press, London
- Ch'en, J., 1970, *Mao Papers: Anthology and Bibliography*, Oxford University Press, London.
- Epstein, I., 1956, *From Opium War to Liberation*, New World Press, Beijing.
- Fairbank, J.K., 1976, *The United States and China*, Harvard College, New York.
- Healy, T., Hsieh, D., 1996, *Mao Now*, dalam *Majalah Asiaweek*, vol. XXII, no. 36, 6 September 1996, hal. 28-45.

Jurnal Filsafat, April 2004, Jilid 36, Nomor 1

Kaiming, S., 1986, *Modern China: a Topical History*, 2nd ed., Foreign Language Press, Beijing

Lewis, J.W., 1963, *Leadership in Communist China*, Cornell University Press, New York.

Mao Tse-tung, 1943, *Beberapa Masalah Tentang Metode Kepemimpinan*, dalam *Mao Tse-tung Xuanji*, Vol. I-IV, Renmin chubanshe, Beijing.

Mao Tse Tung (1883 - 1976), <http://www.geocities.com/CollegePark/Library/6132>

Snow, E., 1944, *Red Star Over China*, 2nd ed., The Modern Library, New York.

Wang, J.C.F., 1976, *Values of the Cultural Revolution*, dalam *Journal of Communication*, vol. 27, no. 3.

Wheelwright, E. L., Mc. Farlane, B. (ed.), 1973, *The Chinese Road to Socialism: Economics of the Cultural Revolution*, Penguin Books, London.

ⁱ “Di dalam semua pekerjaan praktis dari partai kita, semua kepemimpinan yang benar niscaya ‘dari tengah-tengah massa kembali ke tengah-tengah massa’. Ini berarti mengambil gagasan massa (gagasan yang tercerai berai dan tidak sistematis) serta mengumpulkannya (melalui penelitian diubah menjadi gagasan yang terkumpul dan sistematis), lalu pergi lagi ke tengah-tengah massa untuk menyebarluaskan serta menerangkan gagasan ini sampai mejadi milik massa, agar massa berpegang teguh pada gagasan itu dan menerapkannya ke dalam tindakan, memerikan apakah dalam tindakan massa itu gagasan itu tepat atau tidak. Lalu mengumpulkannya lagi dari tengah massa, dan dikembalikan ke tengah-tengah massa sampai massa berpegang kuat. Demikianlah seterusnya, berputar tak putus-putusnya, setiap kali semakin tepat, semakin hidup, semakin kaya. Itulah teori pengetahuan Marxis.” (Mao, 1943: 901).